

Menebak Akhir Kasus 51 Pegawai Tak Lolos TWK KPK

'BOLA PANAS' DI TANGAN PRESIDEN

Pintu penentu nasib 52 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah tertutup semua. Mahkamah Agung (MA), Kamis (9/9) juga memutuskan menolak gugatan uji materiil. Sepekan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak menerima gugatan terkait pasal alih status pegawai komisi anti-rasuah ini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Penyidik senior Novel Baswedan, mewakili teman-temannya mengaku tetap akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal nasib mereka. Bak sebuah film, ada dua skenario tamat yang mungkin terjadi dalam kisruh ini, happy ending atau malah sad ending. Apapun nanti akhir kisahnya, jangan sampai melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Rakyat tidak butuh kegaduhan, tapi aksi nyata.

PERTIMBANGAN MK TOLAK

UJI MATERI TERKAIT TWK KPK

MK menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), karena:

- MK menyebut TWK pegawai KPK konstitusional. Menurut MK, Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
- MK menilai Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.
- MK menjelaskan kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.
- MK menilai bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in case UU 19 Tahun 2019.
- Berdasarkan UU 19 tahun 2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyidik, penyidik, dan pegawai KPK.

PERTIMBANGAN MA TOLAK

UJI MATERI TERKAIT TWK KPK

Menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena:

- MA menilai TWK telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS
- MA menilai asesmen TWK dalam Perkom 1 Tahun 2021 merupakan suatu sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil.
- MA menilai Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Para Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah.
- Sementara mengenai persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun dan dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan menjadi ASN, dinilai MA tidak terkait dengan asesmen TWK.



PROYEK TRANSPORTASI RAKSASA JOKOWI 'KEPENTOK' MASALAH, ADA APA?

Jakarta - Dua proyek besar infrastruktur transportasi raksasa andalan pemerintahan Presiden Jokowi sedang menghadapi kendala besar. Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung tengah sedang menghadapi pembengkakan biaya yang besar, dan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2 juga belum mendapat persetujuan harga dengan pihak kontraktor Jepang sehingga berpeluang pada perlambatan penyelesaian proyek.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berharap agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan proyek ini karena dikhawatirkan adanya strategi 'jebakan' dari Cina. "Jebakan Proyek Kereta Api Cepat Cina Jakarta-Bandung adalah pintu masuk Cina untuk aneksasi infrastruktur strategis di Indonesia," kata Said Didu yang dilontarkan dalam akun Twitternya, dikutip Kamis (9/9).

Said Didu mengungkapkan, proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) sejak awal tidak layak. Dia juga menanggapi kondisi biaya yang membengkak pada proyek ini berdasarkan data 1 September telah mencapai US\$ 1,9 miliar atau mencapai hampir Rp 30 triliun atau tepatnya mencapai Rp 27 triliun (dalam kurs terkini Rp 14.242).

"Memang waktu studi Jepang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak, tapi kan datang Cina mengatakan bahwa biayanya lebih murah dari Jepang ternyata bohong kan, hehehe ternyata biayanya besar sekali," kata Said Dadu.

Terpilihnya Cina sebagai pemenang proyek sempat juga disindir oleh Komikus Jepang, Onan Hiroshi di media sosial. Dalam komik tersebut digambarkan bahwa Cina yang memberikan penawaran lebih murah ber-

hasil menyingkirkan Jepang meski data studi kelayakan terkait pembangunan proyek tersebut lebih dulu dilakukan oleh negeri Sakura.

Selain dari studi Jepang, Said juga mengatakan ketidaklayakan dari harga tiket yang ditawarkan. Pada 2019 lalu, berdasarkan catatan detikcom, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KAIC) memperkirakan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) paling murah Rp 300.000. Said sendiri memprediksi tiket akan dijual Rp 400 ribu.

"Anda bisa bayangkan apakah layak tiketnya itu mungkin Rp 400 ribu dari Jakarta ke Bandung. Apakah ada orang yang mau naik kereta Rp 400 ribu? Mending naik bus atau bawa mobil," tutur Said.

Menhub ke Jepang Bahas MRT

Mengutip keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Hal ini lah memicu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terbang ke Jepang dan meminta pihak Jepang melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dalam wajar. Supaya pembangunan fisik bisa segera di-lanjutkan.

Dalam kunjungannya ke Jepang beberapa hari lalu, agenda pembangunan MRT juga dibicarakan. Budi menegaskan pihak Jepang akan mengikuti sesuai dengan ketentuan di Indonesia. "MRT ini proyek penting kita sampaikan bahwa harga harus sesuai dan kualifikasi harus diikuti, ini saya sampaikan kepada pejabat dan akan memberikan nasihat agar mereka mengikuti sesuai dengan ketentuan Indonesia. Kegiatan yang akan mengharuskan mengikuti harga dan ke-



Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus mengalami pembengkakan anggaran yang dikhawatirkan membebani keuangan negara.

tentuan itu akan diikuti kontraktor Jepang," jelasnya.

Sementara untuk proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, saat ini juga masih dalam perhitungan angka pasti pembengkakan nilai proyek besar-besaran imbas dari keterlambatan pembebasan lahan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Wijaya Karya Ade Wahyu mengatakan pembengkakan biaya masih dihitung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. "Jadi cost over run masih digodok dari internal Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan sponsor saat ini sedang dalam tahap akhir mungkin besaran nilai dari cost over run selesai pada bulan Oktober," katanya.

Wijaya Karya dalam hal ini adalah pemimpin konsorsium dari kepemilikan pemerintah Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN sebesar 60%. Namun ditegaskan sampai saat ini

target pengoperasian kereta cepat ini belum berubah yakni akhir 2022.

Awalnya biaya proyek yang menggandeng Cina ini dinilai mencapai US\$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 85 triliun. Kemudian, di tengah jalan ada kemungkinan biayanya membengkak setelah ada tinjauan dari konsultan yang dilakukan KCIC. Proyek ini diperkirakan tambah bengkak US\$ 1,7-2,1 miliar sekitar Rp 24,14-29,82 triliun (kurs Rp 14.200).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek ambisius di bidang transportasi yang akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Dengan panjang trase 142,3 km. Terbang dari Jakarta hingga Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Walini, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar.(ist)

BIAYA PEMBANGUNAN

KERETA CEPAT

JAKARTA-BANDUNG

BENGGAK JADI RP 114 T

- Pembengkakan biaya proyek telah terjadi berkali kali
- Komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok dinilai kurang lancar
- Dirut KAI sebut kondisi ini berpotensi membebani keuangan negara
- Sebelumnya Tiongkok tawarkan pinjaman US\$ 5,6 miliar dengan tingkat bunga 2% per tahun

BPK TEMUKAN SELISIH DANA PEN RP 147 T, DPR PANGGIL MENKEU

Jakarta-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp 147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengaku sangat prihatin dengan temuan selisih Rp147 triliun ini. Sebab dana ini bukan sedikit dan menyangkut uang masya-rakat. "Kemenkeu dan BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat," kata Hafisz, Kamis (9/9).

Dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2020, ada biaya program PEN di luar skema sebesar Rp27,32 triliun. Dari angka itu, yang sudah dibelanjakan dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.

Kemudian belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun covid-19 per 30 November 2020 sebesar Rp2,55 triliun. Serta lokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.

"Ada relaksasi PNBK K/L sebesar Rp79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBK," ungkap politisi PAN tersebut

Dia melanjutkan, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain PPN ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.

Juga Ada Kejangalan di Kemensos

BPK telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Mereka menyatakan dari total obyek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daerah, dan 10 lainnya menasar BUMN dan badan lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif menyatakan dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan bahwa alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun.

Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun. Dia menyebut selisih sekitar Rp147 triliun tersebut terjadi karena ada beberapa skema

pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.

"Pemerintah mempublikasikan biaya program PCPEN sebesar Rp695,2 triliun sebagai data total program PCPEN dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PCPEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun," ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (6/9).

Temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi Program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.

Selain Kemenkeu, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial. Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020 yang digunakan sebagai data penyaluran bansos tidak valid. BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga (KK) tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda.

Sebelumnya, KPK melakukan

identifikasi empat bidang yang rawan dikorupsi dalam penanganan pandemi Covid-19. Empat bidang dimaksud yaitu terkait pengadaan barang/jasa, hibah kepada Satgas Covid-19 atau pemerintah daerah, realokasi APBN/APBD, dan penyaluran bantuan sosial.

Pertama, terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Kedua, KPK juga mengidentifikasi potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan atau hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/ lembaga/pemda.

Ketiga pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran dalam proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. Keempat pada penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah yang rawan di pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. KPK pun telah meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos untuk merespons keluhan penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. (ist)



TEMUAN BPK TERKAIT ANGGARAN PEN



- Anggaran PEN dalam APBN 2020 : **Rp 841,89 triliun**
- Anggaran PEN publikasi Kemenkeu : **Rp 695,2 triliun**
- Selisih sekitar **Rp147 triliun**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2020 BPK

- Alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.
- Belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun covid-19 per 30 November 2020 sebesar Rp2,55 triliun.
- Alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.
- Relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L sebesar Rp79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBK, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/sertifikasi/ paspor, pengenaan tarif 50 persen, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah. Belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun covid-19 per 30 November 2020 sebesar Rp2,55 triliun.

Uji Coba Lokasi Wisata

DARI 20 DESTINASI, 4 DIANTARANYA ADA DI JATIM

Surabaya- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengusulkan 20 tempat wisata Jawa-Bali dibuka kembali melalui tahap uji coba. Sebanyak 4 destinasi berada di Jawa Timur (Jatim).

Melansir keterangan pers, Kamis (9/9), tahap uji coba ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021. Adapun, Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini menyatakan, sejumlah tempat wisata yang berada pada daerah PPKM Level 3 bisa dibuka kembali asalkan mereka masuk dalam daftar yang sudah ditentukan oleh Kemenparekraf.

Sebelumnya, dikatakan bahwa tempat wisata dalam daerah PPKM Level 3 bisa dibuka kembali asalkan mereka masuk dalam daftar yang sudah ditentukan oleh Kemenparekraf. Dalam daftar tersebut, tempat wisata yang direkomendasikan untuk dibuka kembali selama tahap percobaan dinilai sudah kriteria tertentu yang ditetapkan Kemenparekraf, Kemenko Marves, dan asosiasi terkait.

Kriteria lainnya adalah pengelola tempat wisata setuju untuk mematuhi syarat bahwa mereka akan membatasi usia wisatawan hanya untuk mereka yang di atas 12 tahun. Kemudian, wahana air yang ada di tempat wisata yang dilakukan uji coba pembukaan juga tidak dibuka lantaran belum diizinkan. Misalnya adalah Hawaii Waterpark Malang dari Hawaii Group Malang.

Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana menambahkan, pengelola juga harus dapat menentukan titik krisis atau pelanggaran protokol kesehatan untuk melaksanakan rekayasa administrasi dan teknis. "Juga memiliki mekanisme pengawasan evaluasi, dan pelaporan. Bagaimana kita melakukan pengawasan dapat dilakukan setiap hari terhadap tempat wisata yang diuji coba tersebut," ujar dia.

Meski masuk dalam daftar dari Kemenparekraf, perlu dicatat bahwa tempat wisata yang telah disebutkan masih berupa usulan untuk dibuka kembali saat tahap uji coba. Selain itu, ada juga kemungkinan Kemenparekraf beserta pihak terkait lainnya akan mengubah daftar tempat wisata tersebut. (ist)



Penerapan protokol kesehatan dengan ketat menjadi syarat utama dibukanya kembali lokasi wisata, seperti tampak di Jatim Park 2 yang masuk usulan uji coba pembukaan saat PPKM.

**UJI COBA
LOKASI
WISATA****20 DESTINASI YANG DIUSULKAN**

1. **DKI Jakarta:** Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah.
2. **Jawa Barat:** Taman Safari Indonesia, Taman Bunga Nusantara, The Lodge Maribaya, Glamping Lake Rancabali, Kawah Putih, Jbound, dan Saung Mang Udjo.
3. **Jawa Tengah:** Grand Maerakaca Taman Mini, TWC Borobudur, TWC Prambanan, dan Taman Satwa Taru Jurug.
4. **Yogyakarta:** TWC Ratu Boko, Taman Pintar, dan Watu Lumbung Culture Resort.
5. **Jawa Timur:** Taman Rekreasi Selecta, Jatim Park 2, Hawaii Group, serta Maharani Zoo dan Gua.

**ATURAN-ATURAN YANG
WAJIB DIPENUHI**

- **Pengecualian pengunjung:** Untuk saat ini anak yang berumur kurang dari 12 tahun masih dilarang memasuki tempat wisata yang akan melakukan uji coba.
- **Penggunaan PeduliLindungi:**Langkai ini diterapkan baik untuk pengunjung maupun pegawai di tempat wisata.
- **Protokol kesehatan:** Pengunjung dan pegawai wajib terapkan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan.

**ANTISIPASI VARIAN MU, RSLI SURABAYA
PERIKSA 'KEANEHAN' 78 SAMPEL PASIEN**

Surabaya - Tingkat bed occupancy ratio (BOR) di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya mengalami penurunan drastis di angka 38,3 persen. Namun, di sisi lain tengah dicermati fenomena aneh pada pasien Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Melihat itu, Penanggung Jawab RSLI, Laksamana Pertama dr. Ahmad Samsulhadi mengatkan perlu antisipasi penanganan pasien PMI terkait kemungkinan varian baru. Apalagi RSLI akhir-akhir ini menemukan CT Value ekstrem dan masih pada angka yang sangat rendah.

Ia bahkan meminta agar Spesialis Patologi Klinis sekaligus DPJP RSLI dr Fauqa mengulang tes CT Value tersebut. "Kami menemukan nilai CT Value 1,8 pada satu pasien, sampai saya tanya dan konfirmasi ke dr. Fauqa, ini nilai CT Valuenya 1,8 atau 18? Mohon swab PCR nya diulang, karena pasien ini sudah dirawat 12 hari," terang dr Samsul, dikutip Kamis (9/9).

Namun angkanya tetap sama 1,8. Bahkan beberapa pasien PMI yang sudah 10 hari dirawat nilai CT Valuenya masih di bawah 15. Padahal secara teori pada varian lain jika progresnya

membah, maka CT Value akan naik. Bahkan saat hari ke-13 sudah dinyatakan negatif.

"Ini fenomena baru dan masih kita tindak lanjuti. Karena fenomena yang aneh, saya sudah meminta dr. Fauqa untuk menindaklanjutinya," tutur dr. Samsulhadi.

Sementara itu, Spesialis Patologi Klinis sekaligus DPJP RSLI dr Fauqa mengatakan, temuan kasus kali ini memang berbeda. Karena kondisi pasien pada minggu kedua justru seperti mulai terserang kembali dengan indikasi nilai CT Value yang masih rendah di bawah 25 bahkan di bawah 5.

Untuk meneliti kondisi itu, pengujian sampel darah dilakukan. Sebanyak 78 pasien telah diambil sampel untuk whole genome sequencing (WGS). Tujuannya, mengetahui lebih detail karakteristik virus. Sampel diperiksa di Laboratorium EDC Kampus C Unair.

Pihaknya khawatir pasien terpapar virus varian Mu. Virus tersebut telah menjangkiti 39 negara. Meski adanya rasa kekhawatiran, pihaknya optimistis bisa mengatasinya. Sebab, virus Mu tidak seganas

virus varian Delta.

"Varian Mu masih termasuk varian of interest (VoI). Urutan karakter dasarnya masih sama, tidak mengubah sifat dasar virus. Jadi, tidak perlu terlalu dirisaukan. Kami menangani pasien secara holistik dan terus memonitor apakah pasien dengan CT value rendah masuk varian baru lagi atau tidak," ujarnya.

Diketahui, RSLI saat ini merawat 149 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI yang kebanyakan datang Hongkong, Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan dan lainnya. Sedangkan pasien reguler atau umum/mandiri tinggal 8 orang saja.

Seperti diketahui, memasuki bulan ke-15 RSLI beroperasi, dengan kapasitas 410 bed, hingga kini telah menangani 10.274 pasien, 9.631 diantaranya berhasil disembuhkan, dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,34 persen. RSLI setidaknya telah memberikan kontribusi kesembuhan



Penanggung Jawab RSLI, Laksamana Pertama dr. Ahmad Samsulhadi (tengah) bersama tim saat memberikan keterangan mengenai perkembangan pasien Covid-19.

nasional sebesar 0,27 persen, Jatim pada angka 2,59 persen serta Surabaya pada angka 16,32 persen.

Menurut catatan Rabu (8/9) jumlah pasien Covid-19 yang dirawat tinggal 157 orang. Tingkat kesembuhan pasien mencapai 9.631 orang, dengan rincian sebanyak 80 pasien gejala berat, 222 pasien gejala sedang, dan 6.484 bergejala ringan berhasil ditangani. "Kondisinya semakin baik. Jumlah pasien yang sembuh jauh lebih banyak dibandingkan pasien yang masuk," kata dr Ahmad Samsulhadi. (ard)

490.217 SEKOLAH DIIZINKAN PTM, TAPI HANYA 50% YANG BUKA

Jakarta-Sedikitnya ada 490.217 sekolah yang sudah diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sayangnya, baru sekitar 50% saja yang kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Berbagai kendala di [hadapi, mulai kesiapan sarana prasarana, vaksinasi hingga izin dari orangtua.

"Jadi kira-kira yang melaksanakan PTM terbatas dari daerah-daerah yang diizinkan itu sudah sekitar 50 persen yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Jumeri, Kamis (9/9).

Jumeri dalam dialog yang disiarkan melalui YouTube Kemendikbud Ristek, mengatakan 90 persen daerah kabupaten/kota sudah diizinkan untuk membuka sekolah dan melakukan PTM terbatas. "Ada 471 kabupaten kota dari 514 jadi kira-kira 92 persen. Kemudian 490.217 sekolah dari 540.000 itu kira-kira 91 persen. Itu yang sudah diperbolehkan untuk membuka pembelajaran tatap muka," katanya.

Namun tidak semua yang telah diizinkan itu langsung dapat membuka sekolah dan melakukan PTM. Kecepatan kabupaten/kota dalam membuka sekolah kata Jumeri berbeda-beda. Ia menyebut misalnya di Provinsi Aceh pembukaan sekolah sudah mencapai 81 persen. Sementara di DKI Jakarta jumlah sekolah yang dibuka masih sangat rendah yakni 6 persen.

Sementara untuk kota besar yang sudah membuka paling banyak adalah Kota Batam yakni 44 persen dan Kota

Tangerang Selatan dengan 41 persen. Masih banyaknya daerah atau sekolah yang belum buka dan melakukan PTM terbatas ini dikarenakan adanya dinamika di daerah masing-masing. Misalnya kata dia ada daerah yang baru turun level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi level 2 atau 3 sehingga masih perlu persiapan.

"Secara umum yang belum buka itu karena belum diizinkan oleh daerahnya, Satgas COVID-19 setempat. Alasan kedua di antaranya karena sebagian besar tenaga pendidikan belum mendapatkan vaksin, sehingga menjadi hambatan. Kemudian ada sebagian orang tua yang belum mengizinkan karena belum mantap putra-putrinya berangkat ke sekolah," jelasnya. Selain itu kata Jumeri juga ada sekolah yang menyatakan memang belum siap karena belum mengisi daftar kesiapan PTM terbatas akibat infrastruktur yang belum siap.

60% Ortu Khawatir

Terpisah, Lembaga survei Median bersama Parwa Institute mengeluarkan survei berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan survei tersebut, ternyata 41,4 persen anak-anak mengalami bosan belajar di rumah.

Survei dilakukan pada 19-26 Agustus 2021. Survei dilaksanakan dengan multistage random sampling dan proporsional terhadap 1.000 responden di seluruh Indonesia. Survei memiliki margin of error sebesar kurang-lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan di angka 95 persen. Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Median Rico Marbun.

Dalam survei yang dirilis pada Kamis (9/9), ribuan responden orang tua ditanyakan soal respons anak



Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek pelaksanaan PTM di salah satu sekolah di Kota Semarang.

terhadap pembelajaran jarak jauh. Mayoritas anak yaitu 23,9% mengatakan sudah bosan melakukan sekolah daring.

Lebih lanjut, Rico Marbun mempertanyakan kesiapan orang tua jika anak harus sekolah tatap muka. Dia menyebut sebagian besar orang tua (60%) khawatir jika anaknya saat ini masuk ke sekolah.

Dengan demikian, Rico menyimpulkan ada variabel yang saling berlawanan antara anak mulai bosan dan kekhawatiran orang tua. Hal tersebut, kata dia, menandakan perasaan campur aduk orang tua terhadap anaknya. "Jadi ada perasaan bercampur, mixed feeling, saat bersamaan ingin anaknya sekolah tatap muka, saat bersamaan juga khawatir gitu ya," ucap Rico dalam webinar.

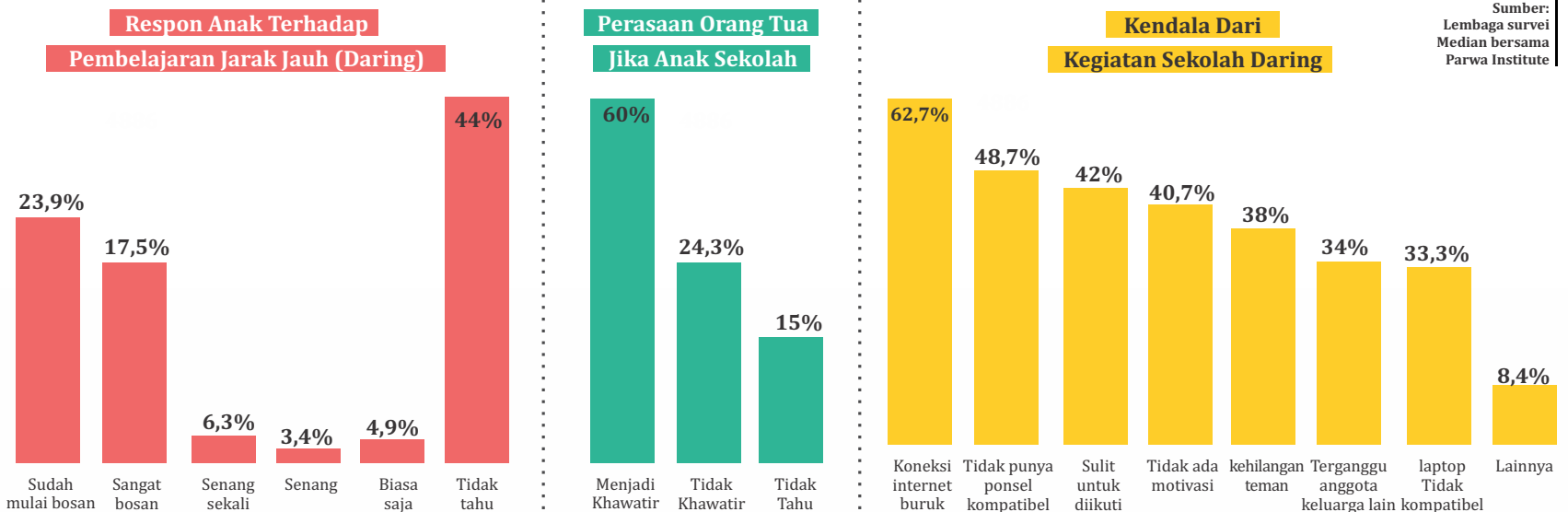
Lebih lanjut, Rico menanyakan terkait tantangan yang dihadapi oleh anak selama pembelajaran jarak jauh.

Dia menyebut tantangan terbesar adalah koneksi internet.

"Apa sebenarnya tantangan yang dihadapi anak dalam ikut pembelajaran jarak jauh? Itu dari 3, yang paling utama itu 2 di antaranya fasilitas pendukung, dan ketiga terkait kurikulum, jadi ini menjadi masukan buat kita semua," ucap Rico.

"Pertama orang tua nyatakan bahwa mereka lihat salah satu hambatan paling besar itu koneksi internet yang buruk 62,7 persen, ini hampir 62 persen orang tua di Indonesia itu salah satu hambatannya koneksi internet. Kemudian tidak memiliki perangkat kompatibel itu 48,7 persen, dan sulit diikuti kurikulum karena tidak didesain kurikulum jarak jauh, jadi ini kurikulum face to face diterapkan jarak jauh, ini 42 persen. Kemudian faktor lain tidak ada motivasi, kehilangan teman, kehilangan lingkungan sosial dan terganggu anggota keluarga lainnya," lanjutnya. (ist)

BAGIMANA TANGGAPAN SISWA DAN ORTU TERKAIT PTM



LEISURE



BERPETUALANG KE DESTINASI WISATA UNIK INDONESIA YUK!

Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari wisata religi, edukasi, religi, bahari, pegunungan, dan berbagai panorama lainnya bisa Anda temui. Namun, terkadang seseorang merasa bosan saat pergi ke tempat wisata yang itu-itu saja. Berikut beberapa tempat wisata unik di Indonesia yang bisa Anda kunjungi, dirangkum dari berbagai sumber.



Kawah Ijen, Jawa Timur

Kawah Ijen yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur menawarkan fenomena alam unik 'api biru' (blue fire) yang disebut-sebut hanya ada dua di dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia. Namun, menyaksikan langsung 'api biru' di dalam perut bumi bukan perkara mudah. Anda perlu terlebih dahulu mendaki Gunung Ijen. Jangan lupa memakai masker respirator dan memastikan tubuh dalam kondisi sehat.



Gereja Ayam, Jawa Tengah

Bukit Rhema Gereja Ayam merupakan tempat ibadah yang bentuknya menyerupai ayam. Terletak di tengah hutan Magelang, Jawa Tengah, gereja ini dibangun pada tahun 1990-an. Pengunjung bisa melihat pemandangan Kota Magelang dari ketinggian yang menakjubkan. Di sana juga terdapat kafe yang letaknya ada di bagian ekor Gereja Ayam.



Batu Lemo Toraja, Sulawesi Selatan

Berkesempatan melawat ke Tana Toraja, Anda bisa mampir ke tempat wisata pemakaman bangsawan Gua Lemo di Desa Sandan Uai, Sulawesi Selatan. Meski pemakaman, tempat ini jauh dari kesan angker, dikarenakan Pengunjung bisa melihat deretan boneka kayu menyerupai jasad orang yang dimakamkan dengan penataan rapi.



Pemakaman Trunyan, Bali

Tempat wisata unik di Indonesia yang satu ini sudah cukup terkenal. Berlokasi di Kintamani, Bali, Pemakaman Desa Trunyan dikenal dengan tradisinya yang tidak mengubur jenazah orang yang meninggal. Jasad akan dibiarkan saja ditutupi sangkar sampai nantinya menyatu dengan tanah. Kawasan ini pun tidak berbau, karena sisa-sisa jasad akan diserap oleh pohon Taru



Giant Swing, Bali

Masih dari Bali, tepatnya di kawasan Badung, ada tempat wisata yang menawarkan sensasi bermain ayunan raksasa di alam terbuka dari ketinggian di atas tebing. Giant Swing Bali tidak hanya memberi kesan sebagai tempat wisata unik, namun sangat cocok bagi Anda yang suka tantangan untuk memacu adrenalin.



Danau Kakaban, Kalimantan Timur

Bagaimana rasanya berenang ditemani ubur-ubur? Jika kamu ingin merasakannya, silakan berenang di Danau Kakaban yang berlokasi di Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Danau Kakaban merupakan danau prasejarah zaman peralihan Holosin. Meski dihuni ribuan ubur-ubur, mereka sudah tidak beracun.



Pulau Komodo, NTT

Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan habitat asli dari kadal raksasa atau Komodo, yang saat ini sudah dikelola Pemerintah Indonesia. Selain melihat langsung Komodo, pengunjung dapat sekaligus menikmati lanskap pantai pasir pink yang menakjubkan di sekitarnya.



Gua Gong, Jawa Timur

Di Pacitan, Jawa Timur, terdapat tempat wisata unik yaitu Gua Gong. Disebut 'Gua Gong' karena batuan yang mengisi gua tersebut dapat menghasilkan bunyi menyerupai gong. Gua Gong memiliki banyak stalaktit dan stalagmit di dalamnya yang menyerupai es dengan bentuk runcing menggantung.



Gili Iyang, Jawa Timur

Tempat wisata unik di Indonesia ini menawarkan oksigen terbaik untuk Anda hirup karena bebas polusi, yaitu Gili Iyang di Sumenep, Jawa Timur. Selain udaranya bersih, Anda bisa bebas menikmati wisata air, berswafoto, dan mengunjungi gua-gua unik di sekitar Gili Iyang.

BERKEBUN DI RUMAH MUNGIL? INI REKOMENDASI TANAMAN YANG COCOK

Banyak orang mulai beralih untuk bercocok tanam sebagai aktivitas baru di masa pandemi ini, baik karena ingin mengusir kebosanan atau mencari kesibukan di luar pekerjaan. Namun, tak sedikit juga yang merasa kesulitan untuk mulai melakukan aktivitas menanam ini

karena terbatasnya ruangan yang ada di dalam rumah.

Jangan khawatir, ada beberapa tanaman yang tidak membutuhkan banyak ruang. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut beberapa jenis tanaman yang paling mudah perawatannya dan tentu saja hemat ruangan.



Tomat

Tomat dapat dengan mudah ditanam di ruang kecil seperti balkon atau teras. Tanaman ini juga bisa berkembang baik dalam pot dengan lebar 18-24 inci atau lebih. Tanaman tomat biasanya membutuhkan iklim yang hangat dan kita harus menunggu hingga 30-40 hari sebelum memanennya sejak benih disemai.

Sebelum menanam tomat, pilihlah varietas terbaik yang menghasilkan hasil maksimal dan tabur benih dalam campuran tanah yang berkualitas. Untuk menanam tomat ceri, kebun vertikal adalah pilihan yang baik. Pastikan juga tanaman mendapat cukup cahaya langsung karena tomat menyukai kehangatan. Tak lupa untuk menyiramnya secara teratur, tetapi jangan terlalu berlebihan atau tanaman akan layu. Pangkas daun tua dan kuning untuk menjaga tanaman tomat tetap sehat.



Daun mint

Daun mint adalah salah satu tanaman herbal abadi yang paling mudah dan paling cepat tumbuh. Untuk menanamnya, pilih pot kecil, idealnya berdiameter 8-12 inci (20-30 cm) dengan drainase yang sangat baik dan dapat ditanam di dapur. Tanaman dapat dipanen dengan memotong tangkainya ketika

panjangnya sekitar 8 inci (20 cm).

Tempatkan daun mint dalam toples penuh air atau tabur benih langsung di pot tanah. Daun mint juga menyukai naungan parsial dan tanah yang lembab. Jadi, menjaga pot di dekat jendela mendorong pertumbuhan. Ini adalah tanaman yang kuat, sehingga membutuhkan sedikit perawatan. Namun juga membutuhkan pemangkasan teratur agar lebih sehat.



Lemon

Lemon dapat dengan mudah ditanam di halaman belakang atau balkon. Tanaman ini juga dapat berkembang dalam suhu hangat dengan sinar matahari yang cukup. Tinggi vitamin C, lemon sangat bermanfaat untuk hiasan salad dan dibuat sebagai minuman yang segar, serta sehat. Tips menanam lemon yakni pastikan wadah yang digunakan untuk menanam memiliki lubang drainase. Kita juga dapat menabur benih dalam campuran pot.

Segera setelah menjadi berkecambah, letakkan pot di bawah sinar matahari. Arah yang paling cocok untuk tanaman lemon tumbuh adalah selatan karena menerima cahaya yang maksimal. Tanaman ini menuntut nutrisi yang cukup dari waktu ke waktu. Jadi, ingatlah untuk menambahkan kompos ke dalam campuran tanah setiap dua bulan, selain nutrisi yang sangat dibutuhkan seperti potasium dan magnesium.



Sumber: Pexels/Cottonbro



Selada

Selada memiliki banyak varian seperti romaine, iceberg, dan butterhead. Jadi pertama-tama, pilih jenis selada yang ingin kita tanam. Sayuran ini mudah tumbuh di balkon dan dapat dipanen dalam waktu 4-6 minggu. Saat menabur benih, tempatkan secara merata dalam campuran pot dan disiram secara menyeluruh di hari-hari awal. Setelah satu minggu, selada cenderung berkecambah dan dapat dipanen

dalam waktu satu bulan.



Kacang buncis

Kacang buncis dapat ditanam di balkon dengan tidak membutuhkan banyak ruang, tidak seperti dengan tanaman kacang lainnya. Cara untuk menanamnya yaitu Kita dapat mulai dengan menabur benih dengan jarak 4-8 inci dalam campuran tanah yang dikeringkan dengan baik, lebih disukai dalam wadah baki dalam barisan. Buncis dapat dipanen setelah 30-60 hari tanam. (Ist)

TIPS MULAI BERKEBUN DI RUMAH BAGI PEMULA

1. Lokasi

Pastikan tempat yang kamu pilih dapat menerima sinar matahari secara langsung, karena kebanyakan tanaman butuh mendapatkan sinar selama beberapa jam sehari.

2. Jenis Tanaman

Para pemula disarankan untuk memilih benih atau tanaman yang cenderung mudah untuk dirawat.

3. Peralatan Berkebun

Kamu memerlukan peralatan tertentu yang paling adalah sarung tangan, sekop, selang, wadah penyiram tanaman, dan gunting pohon.

4. Media tanam

Tanah yang akan dipakai untuk menanam juga perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar tanaman bisa tumbuh dengan baik.

5. Waktu Menyiram

Satu hal yang perlu diperhatikan saat mulai berkebun di rumah adalah frekuensi menyiram setiap tanaman berbeda.

7. Perawatan Kebun

Setelah tumbuhan tertanam dengan baik, jangan lupa untuk merawatnya secara rutin.



PRODUSEN MOBIL 'CLBK' KE PASAR OTOMOTIF INDONESIA



CHERY TIGGO 3X TURBO

SUBARU WRX STI

Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pasar otomotif yang memiliki potensi besar di mata pabrikan otomotif roda empat. Kabarnya, banyak pabrikan mobil yang akhirnya kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia.

Para pabrikan atau merek mobil ini, sebelumnya ada yang sudah pernah masuk dan bersaing di Indonesia. Setelah memutuskan hengkang, para produsen ini ternyata kembali masuk tahun ini. Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK) nih!

Subaru

Nama Subaru mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebab merek asal Jepang ini pernah meramaikan pasar otomotif

Tanah Air beberapa waktu lalu. Sayang, saat itu pengelola sempat tersandung masalah pemalsuan dokumen impor, yang berujung pembekuan oleh Dirjen Bea dan Cukai pada 2014.

Setelah itu merek Subaru secara perlahan tenggelam di Indonesia. Berbagai produk yang masih tersisa di dealer disita untuk kemudian dilakukan lelang resmi sebagai dispensasi pengelola terhadap negara. Kali ini, Subaru hadir dengan Agen Pemegang Merek (APM) baru, yakni PT Plaza Auto Mega (Subaru Indonesia).

"Terhitung sejak 2020, PT Plaza Auto Mega adalah APM Subaru untuk Indonesia," ucap Elizabeth Ace, Marketing & Communications Manager Subaru Indonesia, Maret lalu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah

melakukan sejumlah persiapan untuk dapat melaksanakan kegiatan bisnis serta memasarkan ragam produk Subaru di Tanah Air. "Untuk mulai pemasarannya, estimasi di kuarter ke-4 2021," jelas Elizabeth. Meski begitu, ia masih enggan memberikan bocoran mengenai produk apa saja yang akan dipasarkan di Indonesia.

Chery

Sama halnya dengan Subaru, Chery juga pernah meramaikan industri otomotif Indonesia pada medio 2006-2011 dan 2012-2016. Saat itu, Chery dinaungi oleh dua perusahaan berbeda, yakni PT Unicor Prima Motor (2006-2012) dan PT Chery Mobil Indonesia (2012-2016).

Setelah 5 tahun hengkang, Chery

telah memastikan akan kembali ke Indonesia. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi terkait siapa APM Chery saat ini, kapan akan diresmikan dan informasi detail lainnya.

Berdasarkan keterangan Jongkie D. Sugiarto, selaku Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), prinsipal Chery dari China sempat berkomunikasi dengan pihaknya. "Pernah menanyakan pemahaman mengenai peraturan-peraturan di bidang industri otomotif Indonesia, dan kami sudah diberikan penjelasannya," kata Jongkie saat dihubungi GridOto.com beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini Jongkie mengaku Gaikindo belum mengetahui informasi terkini terkait kapan Chery akan mulai berbisnis di Indonesia. (ist)

LISTSTYLE

AGAR GLOWING, SKINCARE MALAMNYA HARUS DIPAKAI SESUAI URUTAN

Memakai skincare pagi dan malam menjadi andalan wanita untuk mendapatkan kulit wajah sehat dan glowing. Bagaimana urutan skincare malam yang tepat?

Wanita terkadang membutuhkan lebih banyak produk dan perawatan untuk mendapatkan wajah yang diinginkan. Namun produk yang terlalu banyak kerap membuat bingung seperti bagaimana urutan penggunaan skincare yang benar, khususnya di malam hari. Malam hari termasuk waktu penting untuk menggunakan skincare agar produk bekerja dengan maksimal.

Pembersih Wajah

Demi menjaga wajah bebas dari masalah kulit, langkah pertama dari urutan skincare malam adalah menghapus riasan wajah dengan bersih dan cuci muka menggunakan sabun cuci muka sebelum menggunakan produk skincare lainnya. Menurut dokter kulit Mona Gohara, MD yang juga seorang profesor klinis asosiasi di Yale School of Medicine membersihkan wajah perlu dilakukan agar produk skincare yang digunakan dapat menyerap ke kulit wajah dengan baik karena dibutuhkan kulit yang bersih dari minyak dan kotoran.

Toner

Toner dulu dikenal sebagai cairan berbasis alkohol yang dapat membuat wajah iritasi dan perih. Tetapi toner yang kini digunakan sebagai bagian dari skincare adalah cairan yang terbuat dari bahan yang lembut dan menghidrasi untuk memanjakan kulit kering atau bahan pengelupasan kimia untuk mengobati jerawat.

Toner tidak dimaksudkan sebagai produk wajib yang harus ada dalam rangkaian skincare malam kamu. Ini hanya sebagai pilihan dan bisa kamu ganti dengan produk lainnya seperti esense. Lakukan sesuai dengan kondisi wajah kamu sekarang.

Serum

Sama seperti toner, serum bisa digunakan sebagai optional. Serum pada dasarnya adalah suntikan nutrisi, hidrat, dan antioksidan yang sangat terkonsentrasi untuk meningkatkan kesehatan kulit sehingga mendapatkan kondisi wajah yang diharapkan. Meskipun, sekali lagi, serum benar-benar opsional, produk skincare ini termasuk langkah awal yang baik dalam meningkatkan rutinitas perawatan kulit kamu.

Foto : Pexels / Andrea Piacquadio



Jika memasukkan serum ke dalam urutan memakai skincare malam, pilihlah serum yang diisi dengan asam hialuronat, yang menarik air dari udara ke dalam kulit untuk mengisinya dan membuatnya tetap terhidrasi saat kamu tidur. Menurut dokter kulit kosmetik di NYC Shereene Idriss, MD, jika menggunakan perawatan jerawat atau produk anti-penuaan, yang dapat mengeringkan dan mengiritasi, kamu bisa gunakan serum untuk mempersiapkan kulit terlebih dahulu agar lembab.

Krim Mata

Urutan skincare malam setelah serum adalah krim mata. Krim mata memiliki tekstur dan kandungan yang lebih ringan dan lebih tipis daripada pelembab wajah, jadi pastikan untuk mengoleskannya sebelum mengoleskan krim malam. Aturan praktis saat mengaplikasikan perawatan kulit adalah mengoleskan yang paling ringan terlebih dahulu dan yang terberat terakhir, karena produk yang lebih tipis tidak dapat menembus produk yang lebih tebal.

Namun, meskipun krim mata tampak seperti perawatan kulit utama dan akhir dari semua rangkaian,

sejurnya krim mata tidak diperlukan untuk semua orang. Kebanyakan orang berpikir krim mata harus mengandung semacam retinol untuk membantu mengatasi garis-garis halus, tetapi kenyataannya, area mata sangat sensitif dan berisiko mengalami ruam dan iritasi. Gunakan krim mata sederhana yang menghidrasi dan melindungi bagian bawah mata serta memperbaiki kulit terluar kamu dalam semalam.

Perawatan di Spot Tertentu

Idealnya, kamu menerapkan perawatan spot jika terdapat masalah di wajah seperti jerawat, bekas jerawat atau luka dan bintik hitam. Melakukan ini di malam hari sangat membantu menghilangkan permasalahan tersebut karena malam hari adalah waktu kulit bekerja paling keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi jika kamu sudah menggunakan toner

penangkal jerawat dan/atau berencana untuk mengoleskan retinol, cobalah perawatan di pagi hari agar kulit tidak iritasi.

Moisturizer

Urutan skincare malam selanjutnya adalah memakai pelembab atau moisturizer. Moisturizer wajib digunakan di malam hari karena itulah satu-satunya hal yang akan menjaga garda terdepan kulit. Selain itu, menurut dr. Idriss pelembab tidak hanya membuat kulit terhidrasi tetapi juga membantu menahan semua produk di bawahnya agar bahan-bahannya lebih efektif.

Sedangkan menurut dr. Gohara, moisturizer merupakan mode perbaikan di malam hari yang bekerja ekstra keras untuk memperbaiki kerusakan dan meningkatkan regenerasi kulit. Jadi pelembab malam kamu sebaiknya mengandung dengan semua hal yang bermanfaat untuk kulit, seperti asam hialuronat, lipid, dan protein. Kamu juga dapat menggunakan retinol atau menggunakan krim malam anti-penuaan, yang memiliki dosis retinoid yang 'diencerkan' sehingga cenderung lebih lembut, terutama pada kulit sensitif. (Ist)



Menebak Akhir Kasus ... (dari hal 1)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan saat ini pegawai KPK masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo ihwal nasib mereka.

"Mengingat sesuai dengan judicial review dari MA yang menyatakan bahwa tindak lanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respon dari Presiden terkait hal ini," kata Novel lewat keterangan tertulis, Kamis (9/9).

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Tes Wawasan Kebangsaan yang termuat dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. MA mendasarkan putusannya atas tiga pertimbangan.

Menurut Novel, putusan MA menyebutkan bahwa norma TWK dinyatakan sah, namun tindak lanjut atas hasil tes ada di tangan pemerintah. Terlepas dari putusan itu, Novel mengatakan bahwa dalam pemeriksaan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan banyak perbuatan melanggar hukum dari tes itu.

Dia mengatakan pegawai yang dinyatakan tak lolos sudah menyampaikan keberatan pada pimpinan KPK, namun ditolak. Pegawai lantas mengajukan banding administrasi kepada Presiden selaku atasan pimpinan KPK pada Juli 2021, namun belum dijawab.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan telah dikeluarkan keputusan MK, MA, banding Administasi, rekomendasi Ombudsman RI dan rekomendasi Komnas HAM maka sekarang hanya menunggu penyelesaian masalah ini dari Presiden," kata Novel Baswedan.

MA: TWK Merupakan Ukuran Objektif

Untuk diketahui, MA menolak gugatan uji materiil yang diajukan dua orang pegawai KPK. Gugatan itu terkait Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Kedua pegawai KPK yang dimaksud ialah Yudi Purnomo Harahap dan Farid Andhika. Keduanya telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 27 Mei 2021 dan teregister dengan Nomor 26 P/HUM/2021. Perkara tersebut diputus hari ini.

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon I: Yudi Purnomo dan Pemohon II: Farid Andhika," demikian dilihat dalam salinan putusan MA, Kamis (9/9).

Dalam pertimbangannya, MA menyebut bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.

Aturan itu menyebut, TWK merupakan suatu ukuran objektif yang dianggap memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan. Termasuk soal pengembangan karier bagi PNS.

MA berpendapat bahwa aturan soal TWK yang tercantum dalam Perkom 1/2021 sebagai norma umum yang berlaku bagi Pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil yaitu Pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b PP 41/2020.

Sehingga MA berpendapat Perkom bukanlah jadi alasan bagi para pemohon, dalam hal ini Yudi dan Farid, untuk tidak diangkat sebagai ASN. "Para Pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Para Pemohon sendiri yang TMS, sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," ungkap MA.

Atas dasar tersebut, MA memutuskan bahwa pokok permohonan yang diajukan para pemohon tidak memiliki alasan hukum. "Pokok Permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan hukum; Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon patut

untuk ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara," kata pihak MA.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dulu menolak gugatan terkait pasal alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide.

MK menilai peralihan itu tidak bertentangan dengan UUD. Karena itu MK menyatakan gugatan untuk membatalkan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C tersebut tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, MK menolak seluruh gugatan pemohon. "Mengadili: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang putusan yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (31/8) lalu. Gugatan terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN ini diajukan oleh Muh. Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.

Desak Tes Diulang

Sejumlah ahli pun mendesak agar TWK guna alih status pegawai KPK menjadi ASN digelar ulang. Mereka menilai KPK telah melanggar prosedur dalam pelaksanaan TWK pada Maret-April lalu. Permintaan itu disampaikan sejumlah ahli hukum dalam rilis analisis terkait TWK.

Mereka antara lain, Feri Amsari (pakar hukum Universitas Andalas), Usman Hamid (Amnesty International), Bivetri Susanti (dosen STH Jember), hingga Titi Anggraini (aktivis pemilu dan demokrasi). "Melaksanakan TWK ulang yang transparan dan atau melakukan proses alih status sebagaimana pernah diberlakukan terhadap anggota TNI dan kepolisian," demikian dikutip dari rilis.

Permintaan itu sekaligus menanggapi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIX/2021, yang menyatakan TWK konstitusional. Lalu, putusan MK sebelumnya, Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan TWK tak boleh merugikan pegawai.

Meski dua putusan MK akhirnya menyatakan TWK sah dan konstitusional, para ahli menilai putusan tersebut belum memutus prosedur yang dianggap konstitusional. Ahli menilai, kewenangan KPK dalam melaksanakan TWK tidak menjadi pembenaran atas cacat prosedur dalam proses tes, sesuai temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Menurut mereka, KPK tidak bisa berlindung di balik putusan MK. Sebab, sejumlah lembaga yang memiliki otoritas telah memberi penilaian dan menemukan fakta penyalahgunaan wewenang, cacat administrasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK.

"Meskipun TWK konstitusional namun proses pelaksanaannya tidak menjunjung nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) terkait perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata mereka.

"Bahkan dalam temuan Komnas HAM juga telah ditemukan fakta-fakta dalam prosedur pelaksanaan TWK terjadi 11 pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Feri Amsari Cs menilai meski KPK berwenang melaksanakan TWK, namun jika dalam pelaksanaannya ditemukan prosedur yang salah, konsekuensinya akan batal demi hukum.

Selain menggelar TWK ulang, Feri meminta Ketua KPK Firlis Bahuri juga mengakui cacat prosedur dan pelanggaran malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK, sesuai temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Dia juga mendesak agar KPK mematuhi rekomendasi Komnas dan Ombudsman untuk membatalkan hasil tes tersebut.

"Pimpinan KPK mengakui kealpaan dalam proses penyelenggaraan TWK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945, UU Administrasi Pemerintahan, UU Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai tentang kejujuran, transparansi dan menjunjung kemanusiaan," kata dia. (ist,ins)

6 BULAN KINERJA KPK



- 160 Kasus Tengah Berjalan**
- 125 kasus "carryover" tahun lalu
 - 35 kasus diterbitkan sprindik (32 orang ditetapkan sebagai tersangka)
 - 77 kasus tahap penyelidikan
 - 53 kasus tahap penuntutan
 - 35 kasus dieksekusi
 - 50 kasus penyerahan tahap II

Total Pengeledahan

- 45 kali

Total Penyitaan

- 198 penyitaan

Total Diperiksa

- 2761 Saksi

- 50 Tersangka

Penangkapan

- 4 orang

Penahanan

- 33 Orang

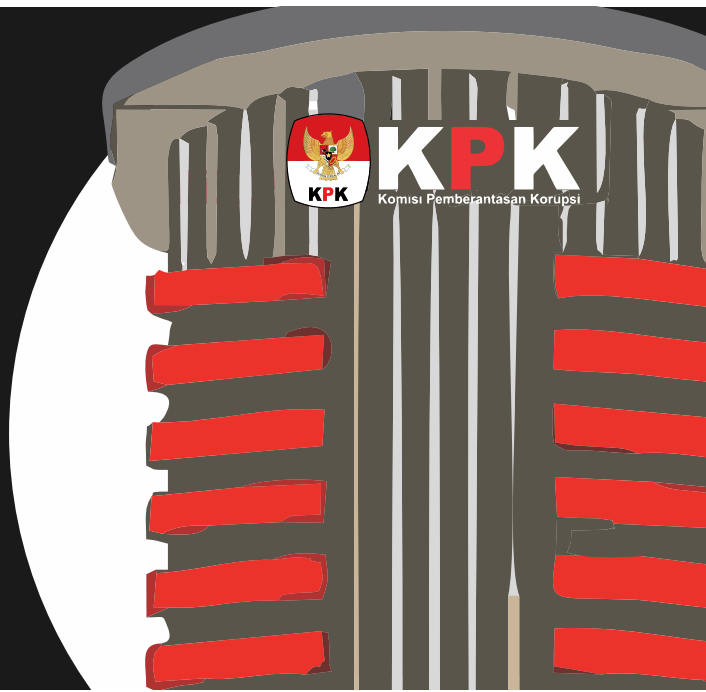
Penyelamatan Potensi Kerugian Negara

- 22,27 Triliun



Pengembalian Uang Ke Kas Negara

- 171,99 Miliar



NOW!!!Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKURNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUAJ, P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

LANGKAH STRATEGIS DPRD JATIM DALAM PEMBERDAYAAN ORMAS

SURABAYA - Banyaknya organisasi masyarakat (Ormas) di Jatim adalah sebagai salah satu potensi besar untuk turut serta membangun Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang terdepan di Indonesia. Potensi ini ditangkap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dengan menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, menilai bahwa Raperda ini penting. Sebab, berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim diketahui setidaknya ada 916 Ormas yang terdaftar. Kemudian jumlah perkumpulan ada 197 dan jumlah yayasan ada 26.

"Penataan Ormas di Jatim menjadi semangat bersama agar peran serta masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan benar-benar dilibatkan dalam penataan pembangunan di Jawa Timur. Sebagian besar rumusan norma dari Raperda ini merupakan penjabaran ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," tutur Achmad Iskandar.

Untuk itu, dalam upaya pemberdayaan dan keberlangsungan Ormas serta peran mereka dalam turut serta mendukung pembangunan daerah, maka peran pemerintah dan pemerintah daerah bisa diikutsertakan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Bayu Airlangga, juga berharap Raperda ini nantinya akan mampu menata Ormas di Jatim agar berjalan sesuai dengan aturan sebagai Ormas untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, Ormas yang berada di Jatim akan berfungsi secara maksimal dan berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan Ormas itu sendiri. Sehingga keberadaan Ormas tidak terkesan liar.

Bayu Ia menegaskan, inisiatif adanya Raperda tersebut didasari banyaknya Ormas yang berdiri saat ini dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Juga akan dilakukan penguatan Ormas yang ditekankan pada penguatan nilai keagamaan, kebangsaan, sosial budaya, peningkatan management dan kelembagaan, serta peningkatan



Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar



Wakil Walikota Jawa Timur, Emil Dardak

kapasitas ormas sesuai masing-masing bidang," tegas politisi Partai Demokratini.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah, juga berpendangan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan pada Ormas. Dukungan tersebut bisa berupa pendampingan supaya Ormas lebih mandiri dan juga bisa berupa dukungan pendanaan.

Bahkan, dia menandakan bahwa Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat ini bakal menjadi acuan bagi Ormas di Jawa Timur. Salah satunya adalah acuan tentang tertib administrasi guna pendataan di Bakesbangpol baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, Ormas tersebut akan terdata secara legal. Selanjutnya, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan baik dalam bentuk pendampingan pembinaan maupun pendanaan.

Dengan adanya peran pemerintah untuk pengembangan Ormas ini, maka diharapkan ada timbal balik dari Ormas untuk turut mendukung berbagai program pembangunan pemerintah menuju Jatim lebih baik. "Biar bagaimanapun, Ormas kita harapkan mendukung terhadap pembangunan daerah. Sehingga, Pemprov bisa dijadikan mitra," ujar anggota DPRD dari Dapil Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi ini.

Sedangkan, sesuai naskah draft Raperda Pemberdayaan organisasi masyarakat ini, Pemprov Jatim akan menyusun rencana program pember-

dayaan Ormas yang didasari pada identifikasi masalah, kebutuhan Ormas, SDM Ormas dan lingkungan Ormas. "Ada kewenangan dari Pemprov untuk membubarkan sebuah Ormas yang ingin membuat rusuh di Jatim," tutur anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafi'i.

Hal itu dilakukan jika memang Ormas sudah tidak lagi berjalan pada rel semestinya. Sehingga, lanjut mantan Wakil Wali Kota Pasuruan ini, Pemprov melalui Bakesbangpol bisa merekomendasikan ke Kemenkumham untuk membubarkan Ormas yang dirasa benar-benar membahayakan dan membuat kerusuhan di Jatim.

Hal itu sejalan dengan, anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M Batarago. Dia menandakan bisa saja Ormas menjadi tunggangan politik kalangan tertentu. Dengan demikian, Raperda ini menjadi urgen untuk mengatur peran Ormas tetap berjalan dengan baik dan menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.

"Kami terus gali masukan dari masing-masing daerah agar Perda Ormas ini bisa sejalan dengan kondisi Jatim," jelas Yordan M Batarago.

Politisi PDIP ini menyampaikan pembentukan Perda ini juga didasari banyaknya Ormas yang berdiri saat ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan cenderung liar. Sehingga banyak Ormas yang ada malah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ini jauh dari hakekat pendirian Ormas itu sendiri.

Dia menjelaskan, nantinya, Perda

ini akan memberikan kewenangan pada Pemprov untuk melakukan pembinaan dan tindakan lain bagi Ormas berpotensi menimbulkan keadaan tidak kondusif di Jatim. Hal itu bisa dilakukan melalui Bakesbangpol dengan merekomendasikan ke Kemenkumham.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan jumlah Ormas di Jatim terbilang besar. Karenanya, Pemprov memahami jika Raperda inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan potensi besar itu menjadi berkualitas dan berjalan beriringan dengan Pemda dalam pembangunan masyarakat Jatim.

"Terhadap materi yang diatur dalam Raperda ini, pada dasarnya kami dapat memahami dan mengapresiasi," ungkap mantan Bupati Trenggalekitu.

Dia juga melihat bahwa penyusunan materi yang sederhana dan secara teknis diamanatkan dalam peraturan Gubernur, membuat rancangan peraturan daerah ini tidak rumit. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk memahami isi Perda itu.

Dia menandakan, yang lebih penting adalah Raperda ini benar-benar diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ormas serta betul-betul mampu menciptakan Ormas yang berkualitas. "Dan mempunyai daya dukung positif bagi pembangunan bangsa dan negara pada umumnya serta pembangunan daerah pada khususnya," ungkapnya. (ufi/adv)